

Peran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan (PUPRPKPP) Provinsi Riau Dalam Pemeliharaan Jalan Di Kota Pekanbaru

* Cahya Ningrum Ciptana Dewi¹, Data Wardana²

¹Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

²Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

*Corresponding Author : [cahyaningrumciptanadewi @student.uir.ac.id](mailto:cahyaningrumciptanadewi@student.uir.ac.id)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau dalam pemeliharaan jalan, karna masih ditemukannya kerusakan jalan di Kota Pekanbaru yang memengaruhi keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan Penelitian bertujuan menganalisis peran dinas berdasarkan indikator koordinator, fasilitator, stimulator, dan motivator serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dinas telah berjalan melalui keterlibatan berbagai pihak dalam kegiatan pemeliharaan jalan. Ketersediaan sarana, prasarana, tenaga kerja, serta dukungan anggaran yang mendukung pelaksanaan pemeliharaan, meskipun keterbatasan fasilitas dan tingginya beban lalu lintas memengaruhi ketahanan hasil perbaikan. Dinas juga telah memiliki prosedur penanganan darurat dan juga upaya mendorong keterlibatan masyarakat melalui penyediaan aplikasi pelaporan namun belum dimanfaatkan secara optimal akibat kurangnya sosialisasi. Kesimpulannya, peran dinas telah berjalan, tetapi masih memerlukan peningkatan pada aspek koordinasi, kualitas perbaikan, pemerataan respons, dan sosialisasi kepada masyarakat.

Kata Kunci: Peran, Pemeliharaan, Jalan

Abstract

This research aims to find out the Role of the Riau Province PUPRPKPP Office in road maintenance, because there are still road damage found in Pekanbaru City that affects the safety and comfort of road users. The research aims to analyze the role of the service based on the indicators of coordinator, facilitator, stimulator, and motivator as well as identify the factors that hinder its implementation. The research method used is qualitative descriptive through interview, observation, and documentation techniques. The research results show that the role of the service has been through the involvement of various parties in road maintenance activities. The availability of facilities, infrastructure, manpower, and budget support that supports the implementation of maintenance, although the limitations of facilities and high traffic burdens affect the resilience of repair results. The service has also had emergency handling procedures and also efforts to encourage community involvement through the provision of reporting applications but has not been optimally utilized due to lack of socialization. In conclusion, the role of the service has been running, but still requires improvement in the aspects of coordination, quality of improvement, equal distribution of response, and socialization to the community

Keywords: Role, Maintenance, Road.

PENDAHULUAN

Infrastruktur jalan merupakan komponen strategis dalam menopang konektivitas antarwilayah, mobilitas penduduk, serta pertumbuhan ekonomi daerah. Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dipandang sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan pemerataan pembangunan (Rodzi, 2023). Jalan yang memadai menciptakan efisiensi distribusi yang berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, aksesibilitas yang baik juga membuka peluang investasi, mendorong perkembangan usaha, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat perekonomian nasional (Damanik et al., 2024).

Dalam otonomi daerah, tanggung jawab pembangunan dan pemeliharaan jalan tidak lagi sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat, melainkan telah dilimpahkan kepada pemerintah daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelimpahan kewenangan bagi daerah untuk merencanakan dan mengelola infrastruktur secara lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat (Sadikin et al., 2021). Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan menegaskan bahwa pemerintah daerah berkewajiban mengatur, membangun, serta memelihara jalan sesuai dengan wilayah kewenangannya masing-masing.

Kewenangan pemeliharaan jalan provinsi berada pada Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau. Dalam pelaksanaannya, dinas ini dituntut untuk menjalankan perannya secara efektif melalui koordinasi lintas instansi, penyediaan sarana dan prasarana, respons cepat terhadap kerusakan jalan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaporan kondisi jalan. Namun, berdasarkan kondisi empiris di lapangan, masih terdapat kendala yang memengaruhi optimalisasi peran tersebut, seperti tingginya beban lalu lintas, keterbatasan fasilitas, serta belum meratanya respons penanganan kerusakan jalan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini merumuskan pertanyaan: bagaimana peran dinas dalam pemeliharaan jalan di Kota Pekanbaru ditinjau dari indikator koordinator, fasilitator, stimulator, dan motivator, serta faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dinas berdasarkan keempat indikator tersebut sekaligus mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pemeliharaan jalan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini berfokus pada penggambaran secara mendalam mengenai Peran Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau dalam pemeliharaan jalan di Kota Pekanbaru berdasarkan indikator koordinator, fasilitator, stimulator, dan motivator. Pendekatan ini dipilih untuk memahami fenomena yang terjadi di lapangan melalui data yang bersifat naratif dan kontekstual.

Dalam penarikan informan dan key informan penulis menggunakan Teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono, Teknik Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Dalam teknik ini penentuan dan pengambilan informan didasarkan pada pertimbangan informan yang mengetahui permasalahan dilapangan dalam penelitian (Rosa et al., 2022).

Subjek penelitian terdiri dari aparatur pada Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau, pihak terkait yang terlibat dalam pemeliharaan jalan, serta masyarakat sebagai pengguna jalan. Pemilihan informan dilakukan secara purposive berdasarkan keterlibatan dan pemahaman mereka terhadap proses pemeliharaan jalan. Objek penelitian adalah

pelaksanaan peran dinas dalam kegiatan pemeliharaan jalan di wilayah Kota Pekanbaru.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi langsung di lapangan, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai peran dinas beserta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau telah menjalankan fungsi koordinasi dengan melibatkan berbagai pihak dalam kegiatan pemeliharaan jalan di Kota Pekanbaru, seperti unit teknis internal, kontraktor pelaksana, serta pemerintah kota. Koordinasi ini terlihat dari adanya pembagian tugas yang jelas dalam penanganan kerusakan jalan, khususnya pada ruas jalan provinsi yang berada di wilayah perkotaan. Namun demikian, di lapangan masih ditemukan adanya keterlambatan penanganan pada beberapa titik kerusakan, yang menunjukkan bahwa mekanisme koordinasi belum sepenuhnya berjalan efektif. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun struktur koordinasi telah terbentuk, implementasinya masih menghadapi kendala teknis dan operasional.

Secara teoritis, peran koordinator menuntut kemampuan mengintegrasikan berbagai sumber daya dan pihak yang terlibat agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran tersebut telah dijalankan, tetapi belum sepenuhnya mampu menghasilkan respons yang merata di seluruh titik kerusakan jalan.

Dalam perannya sebagai fasilitator, dinas telah menyediakan sarana dan prasarana pendukung pemeliharaan jalan, seperti ketersediaan tenaga kerja, peralatan, material, serta dukungan anggaran. Fasilitas ini memungkinkan pelaksanaan pemeliharaan jalan secara rutin maupun darurat. Akan tetapi, keterbatasan jumlah peralatan menyebabkan proses pemeliharaan belum dapat menjangkau seluruh titik kerusakan secara cepat.

Temuan ini menunjukkan bahwa peran fasilitator telah berjalan secara fungsional, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya yang tersedia. Dalam perspektif teori peran, fasilitator tidak hanya menyediakan sarana, tetapi juga memastikan ketersediaan tersebut mampu menjawab kebutuhan di lapangan secara optimal.

Peran stimulator terlihat dari adanya prosedur penanganan darurat terhadap kerusakan jalan yang membahayakan pengguna jalan. Dinas memiliki mekanisme respons cepat ketika menerima informasi kerusakan, baik melalui laporan internal maupun laporan masyarakat. Namun, hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa respons tersebut belum dirasakan secara merata, karena masih terdapat jalan rusak yang dibiarkan dalam waktu cukup lama sebelum diperbaiki.

Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pendorong atau penggerak (stimulator) telah ada dalam sistem kerja dinas, tetapi belum sepenuhnya mampu memberikan dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Dinas telah menyediakan ruang partisipasi masyarakat melalui aplikasi pelaporan "SiJari Mantap" dan media sosial resmi sebagai sarana penyampaian informasi kerusakan jalan. Upaya ini menunjukkan peran dinas sebagai motivator yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan jalan. Namun, tingkat pemanfaatan

aplikasi tersebut masih rendah karena kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat mengenai tata cara pelaporan.

Hasil observasi menunjukkan bahwa masyarakat lebih sering menyampaikan keluhan secara informal melalui RT/RW atau percakapan antarwarga. Temuan ini mengindikasikan bahwa upaya motivasi yang dilakukan dinas belum sepenuhnya efektif dalam membangun kesadaran dan keterlibatan aktif masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau dalam pemeliharaan jalan di Kota Pekanbaru telah dijalankan sesuai dengan indikator koordinator, fasilitator, stimulator, dan motivator. Namun, pelaksanaan peran tersebut masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi sumber daya, koordinasi, maupun partisipasi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwasanya ada beberapa faktor yang menghambat peran Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau dalam pemeliharaan jalan di Kota Pekanbaru sebagai berikut :

1. Keterbatasan anggaran pemeliharaan menyebabkan sebagian ruas mengalami keterlambatan penanganan.
2. Keterbatasan fasilitas berupa peralatan yang telah lama memerlukan perawatan serta peremajaan dapat memperlambat proses pekerjaan
3. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan kerusakan jalan akibatnya dinas lambat memperoleh informasi kondisi jalan rusak
4. Tingginya beban lalu lintas dan kendaraan bermuatan berat menyebabkan jalan cepat kembali rusak setelah diperbaiki sehingga hasil pemeliharaan tidak bertahan lama

SIMPULAN

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau dalam pemeliharaan jalan di Kota Pekanbaru telah dijalankan melalui fungsi koordinator, fasilitator, stimulator, dan motivator. Pada aspek koordinasi, dinas telah melibatkan instansi terkait dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan. Sebagai fasilitator, dinas menyediakan sarana, prasarana, tenaga kerja, serta dukungan anggaran, meskipun masih terdapat keterbatasan fasilitas dan tingginya beban lalu lintas yang memengaruhi kualitas dan daya tahan hasil perbaikan. Pada peran stimulator, dinas memiliki prosedur penanganan serta respons terhadap laporan kerusakan jalan, namun pemerataan respons belum sepenuhnya dirasakan masyarakat. Sementara itu, pada aspek motivator, upaya mendorong partisipasi masyarakat melalui aplikasi pelaporan belum dimanfaatkan secara optimal akibat kurangnya sosialisasi. Dengan demikian, tujuan penelitian untuk menganalisis peran dinas dan mengidentifikasi faktor penghambat telah terjawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Damanik, D., Damanik, P., Nopeline, N., Simalungun, U., Siantar, P., Jalan, I., & Infrastructure, R. (2024). Analisis pengaruh infrastruktur jalan dan infrastruktur listrik terhadap pertumbuhan ekonomi di kota pematang siantar. *Jurnal Kajian Fenomena Ekonomi & Bisnis*, 02(01), 59–67.
- Rodzi, M. F. (2023). Pembangunan Infrastruktur Dan Pemerataan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Masyarakat dan Desa*, 3(2), 151–163. <https://doi.org/10.47431/jmd.v3i2.353>
- Rosa, R. A., Winarti, & Suranto, J. (2022). Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Di Kota Surakarta (Studi Kasus Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. *Jurnal Hukum*, 28–56.

Sadikin, S., Hannan, S., & Sunani, U. (2021). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Ulumanda. *jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(September).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan